

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Semarang

Halaman 23

Raih WTP Berturut-turut Delapan Kali



SERAHKAN LHP: Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Bupati Semarang, Mundjirin di Gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan 175 KM 14 Semarang, Senin (20/5) siang. (42)

UNGARAN- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran (TA) 2018, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Prestasi ini menjadikan Pemkab Semarang meraih opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali kepada Bupati Semarang Mundjirin dan Ketua DPRD Bambang Kusriyanto di Gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan 175 KM 14

Semarang, Senin (20/5) siang.

Atas pemberian opini tersebut, Bupati Mundjirin mengaku sangat senang. Menurutnya pencapaian itu merupakan hasil kerja keras jajaran eksekutif, yang didukung oleh legislatif untuk menggunakan keuangan negara sesuai aturan yang ada. Apalagi pada pemeriksaan kali ini, BPK Perwakilan Jawa Tengah melibatkan akuntan publik.

"Kami sempat was-was hasilnya akan seperti apa. Tetapi syukur Alhamdulillah, opini WTP dapat kami raih lagi," ujarnya, didampingi Sekda Gunawan Wibisono.

Walaupun telah meraih WTP sebanyak delapan kali berturut-turut, pihaknya tetap mengharapkan

adanya kerja sama dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah. Kerja sama itu akan diwujudkan dengan mengirinkan staf pelaksana keuangan untuk konsultasi dan koordinasi pelaksanaan keuangan daerah.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali menyebutkan, pihaknya menemukan empat temuan selama proses pemeriksaan. Diantaranya terkait tata usaha kas, aset perusahaan daerah maupun regulasi penatausahaan retribusi daerah.

"Kami berharap temuan itu dapat ditindaklanjuti, terkait penatausahaan retribusi pajak dan retribusi daerah yang memang belum ada Peraturan Bupati. Jika hal itu ditata, pendapatan akan lebih meningkat,"

tandasnya.

Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Abdullah Maskur mengungkapkan, bila jumlah temuan kali ini menurun dibandingkan tahun lalu. Hal itu menunjukkan bahwa LKPD yang disusun telah memenuhi peraturan yang ditentukan. "Jumlah temuan yang menurun menjadi indikator laporan yang kita sampaikan lebih baik dan bermutu."

Penyusunan LKPD TA 2018, didasarkan pada kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku dan pelaksanaan pengendalian internal. Selain itu sesuai dengan standar akuntansi dan kecukupan pengungkapan pelaksanaan dengan jelas. (H86-42)